



BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LAPORAN TPB/SDGS 2021

Provinsi Nusa Tenggara Barat

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



SEKERTARIAT SDGS

Jln.Flamboyan No.2 Mataram

ABSTRAK

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016 -2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan - tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. Pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional ini menunjukkan kontribusi yang positif dari provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan hingga 2030.

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di provinsi NTB, berdasarkan data capaian tahun 2021 adalah jumlah indikator yang tercapai 109 indikator, yang akan tercapai sebanyak 13 indikator dan sisanya adalah indikator belum tercapai yang perlu perhatian khusus terutama intervensi program/kegiatan untuk mendukung pencapaian target pada masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tinjauan status pencapaian 17 tujuan TPB/SDGs bisa dilihat dari keadaan dan kecenderungan (trend) dimana angka kemiskinan dan rawan pangan mengalami penurunan, target harapan hidup dan IPM meningkat, rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air layak minum, peningkatan rasio elektrifikasi listrik, jumlah angkatan kerja di NTB terus mengalami peningkatan, pertumbuhan dan kontribusi PDRB industri pengolahan yang lebih tinggi, Ketimpangan ekonomi atau indeks gini mengalami peningkatan, Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, nelayan terlindungi atau terfasilitasi dengan asuransi mengalami tren peningkatan, kualitas tutupan lahan NTB lebih baik dan Indeks Kapasitas Fiskal daerah meningkat.

Tantangan yang cukup dinamis yang sedang dihadapi pemerintah provinsi NTB dimasa covid-19 pada tahun 2020 yang masih berlanjut pada tahun 2021 sangat dirasakan dampaknya diberbagai sektor pembangunan, untuk itu Pemerintah Daerah berusaha untuk melakukan pemulihan sektor-sektor pembanguan yang terpuruk. Disamping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan strategi dan arah kebijakan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2023 yang merupakan bagian internalisasi dan harmonisasi RAD tentang percepatan dan pencapaian TPB/SDGs Provinsi NTB tahun 2019-2023. Upaya percepatan dan pencapaian target indikator melalui intervensi program/kegiatan yang di fokuskan untuk mendukung program prioritas dan program unggulan. Keberhasilan pencapaian target-target indikator SDGs di Provinsi NTB tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan/pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan kerjasama intensif diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang merupakan komitmen bersama dengan memastikan sinergitas program/kegiatan dapat berjalan secara optimal.

KATA PENGANTAR

Pada tanggal 25 September 2015, Negara-negara anggota PBB merangkai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium, atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah berlangsung dari tahun 2000 sampai 2015. TPB sendiri menyertakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tanggal waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016 - 2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan - tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Laporan SDGs Provinsi NTB tahun 2020 yang disusun menggambarkan progres capaian 17 tujuan SDGs yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.

Dengan adanya TPB yang dicanangkan oleh PBB diharapkan dapat mendorong semua Pemerintah Daerah, khususnya Nusa Tenggara Barat untuk terlibat dan mensukseskannya. Mengingat pada pencanangan MGDs sebelumnya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup sukses dalam upaya pencapaian tujuan MDGs. Hal ini terlihat dengan Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB selama lima tahun berturut - turut mendapatkan MDGs Award dari pemerintah pusat. Prestasi ini harus memacu NTB untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaiannya pada TPB/SDGs saat ini dan dimasa mendatang. Adapun langkah startegis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB guna memastikan terlaksanakanya TPB/SDGs ke

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur NTB Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 tentang rencana aksi daerah percepatan pencapaian TPB/SDGs tahun 2019 – 2023 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun substansi muatan yang diintegrasikan dalam dokumen dimaksud diantaranya, sasaran, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.

Guna memastikan terwujudnya capaian tujuan TPB/SDGs, maka diharapkan peran masing-masing stakeholder yang terkait sesuai tupoksi dan kewenangannya agar mengoptimalkan implimentasi kegiatan-kegiatan strategisnya dengan menggunakan instrumen analisa dan data yang terukur sesuai standar akademik. Oleh karena itu, untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelaraskan percepatan pencapaian TPB/SDGs maka Pemerintah Daerah Provinsi NTB telah memfasilitasi terbentuknya riset center SDGs yang beranggotakan para pakar dari perwakilan Perguruan Tinggi yang ada di NTB.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan laporan Sekertariat TPB/SDGs tahun 2020 yang menggambarkan peran berbagai stakeholder dalam berkontribusi membangun daerah NTB dapat bermanfaat dan juga menjadi referensi pertimbangan perencanaan pembangunan daerah NTB di masa mendatang. Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini baik dari sisi konten, materi maupun tata naskah masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan penyusunan laporan selanjutnya sangat kami harapkan.

Mataram, Maret 2022

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB



Dr. Ir.H. Iswandi, M.Si

DAFTAR ISI

ABSTRAK	_____	i
KATA PENGANTAR	_____	ii
DAFTAR ISI	_____	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	Berisi : Latar belakang _____	
BAB II	TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)	
	Berisi : Capaian Target dan Indikator TPB/SDGs, Keadaan dan Kecendrungan (Tran), Tantangan dan Pembelajaran, Kebijakan dan strategi, dan Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs dari 17 Tujuan TPB SDGs _____	5
BAB III	PEMBELAJARAN BAIK TPB/SDGS _____	83
BAB IV	PENUTUP _____	90
DAFTAR PUSTAKA	_____	91
LAMPIRAN	Indikator Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB / SDGs)	

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan MDGs yang tidak tercapai. TPB/SDGs dalam pencapaiannya mengutamakan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan.

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah : Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Ditingkat Nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis

Kemestrian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, adalah: “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” yang akan diwujudkan melalui 6 misi, yaitu : 1) NTB Tangguh dan mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah 2) NTB Bersih dan melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi 3) NTB Sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah 4) NTB Asri dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan 5) NTB Sejahtera dan mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi 6) NTB Aman dan berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari visi dan misi ini, terlihat jelas keselarasan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dalam RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023.

Pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional ini menunjukkan kontribusi yang positif dari provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMD 2019-2023, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu,

fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati.

Sinergi antara RPJMN 2020-2024 RPJMD dan TPB/SDGs ditunjukkan pada keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa upaya penting yang dilakukan sebagai komitmen pemerintah Provinsi NTB dalam percepatan pencapaian SDGs di Tahun 2030 adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah, yang dicirikan salah satunya dengan meningkatnya proporsi belanja langsung dan memprioritaskan target-target SDGs yang memiliki daya ungkit untuk mengintegrasikan pencapaian target lainnya.

Pemerintah NTB juga membangun dialog kebijakan dan komunikasi yang konstruktif dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sebagai kesempatan bagi pemangku kepentingan di NTB baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, NGO, Filantropi maupun dunia usaha untuk mendiskusikan kebijakan publik dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan khususnya melalui upaya pencapaian SDGs, serta memberi masukan bagi penyusun kebijakan dalam rangka SDGs di daerah.

Point penting dalam SDGs yang utama adalah pembangunan berbasis hak asasi diarahkan agar dapat memfasilitasi generasi sekarang sekaligus generasi yang akan datang. Konsep pembangunan adalah mengurangi sampah dari hasil pembangunan yang tidak efisien, maka SDGs mendorong cara-cara pencapaian dengan beberapa nilai, yaitu diantara kesetaraan,

inklusif dan partisipatif dengan strategi pembangunan terintegrasi yang diperankan oleh berbagai pihak.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan laporan tahunan TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga non pemerintah terutama terkait data capaian indikator, program/kegiatan yang mendukung capaian serta pembelajaran dari praktik baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun nonpemerintah

BAB II



TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)






Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Target Pencapaian Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional								
1.2.1*	Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis Kemiskinan	BPS/suse nas, BDT	%	14,75 (2018)	11,75	13,83	Semua OPD	▲
1.2.2*	Penduduk Miskin	BDT	Orang	737.460	547.010	735.300	Semua OPD	▲
Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (BPJS)/ P BPJS	BPS	%	PM	PM	56,77	Dinas Kesehatan	
1.3.1 (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/PSJS N-K	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	%	68,83	85,99	67,23 (Agustus 2021)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	▲
1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas / P DMMR	Dinas Sosial Provinsi NTB	%	5,7	8,0	8,0	Dinas Sosial Provinsi NTB	●
1.3.1 (d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat	Dinas Sosial Provinsi NTB	Orang	165.362	435.844	158.182	Dinas Sosial Provinsi NTB	▲
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan,								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat.								
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan/P Salifaskes (Kelompok Penduduk 40% Terbawah)	BPS/Suse nas	%	85.72 (2016)	88.07	96,14	Dinas Kesehatan	
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12 - 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap / PIDL	BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia	%	PM	PM	PM	BKKBN	
1.4.1.(c)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin /CPR-SC	BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia	%	PM	PM	71,03	BKKBN	
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan / P AML	BPS/Suse nas	%	69.58 (2016)	77.95	78,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Kesehatan	
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan/P LSL	BPS/Suse nas	%	58.31 (2016)	68.78		Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Kesehatan	
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan / P RTKP	BPS/Suse nas	%	PM	PM		Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat / APM SD	BPS/Suse nas	%	100.57	100.54	98,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat / APM SMP	BPS/Suse nas	%	94.84	100.54	85,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMA/MA/ sederajat / APM SMA	BPS/Suse nas	%	106.99	97.50	67,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0 - 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran / PKAL	BPS/Sus enas	%	PM	PM	96,6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN / PSPU	BPS/Sus enas	%	PM	PM	99,86	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
Target 1.5 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi ketahanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, social, lingkungan dan bencana								
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah	BPBD Provinsi NTB	Lokasi	PM	PM	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.5.1.(e)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	BPBD	Resiko	PM	PM	128,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	DIBI/ JIUPAS NA	Rupiah	PM	PM	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	BPBD	dokumen	2	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Bappeda Provinsi NTB	Rupiah (Juta)	104.5554 (2018)	2.537.502	3.283.476	Bappeda	●

Keterangan: "a" adalah data realisasi; "PM adalah *Prememory*,

● = Tercapai ▲ = akan tercapai ▲ = Tidak tercapai

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021, penurunan angka kemiskinan Nasional berbanding lurus dengan Penurunan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2017, persentase kemiskinan



Provinsi NTB 15,05 dengan jumlah penduduk 793.780 jiwa. Pada tahun 2018, persentase kemiskinan Provinsi NTB sebesar 14,63 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 735.620 jiwa menurun sebesar 0,42 persen dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 menurun menjadi 13,88 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 705.680 jiwa. Tetapi pada tahun 2020 terlihat adanya kenaikan persentase penduduk miskin sebesar 0,35 Persen dari tahun 2019. Porsentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 14,23

dengan jumlah penduduk sebesar 746.040 dan Tahun 2021 prosentase penduduk miskin sebesar 13,83 dengan penduduk sebesar 735.300 jiwa menurun sebesar 0,4 persen dari tahun 2020.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan yang dihadapi Provinsi NTB saat ini adalah pandemi covid-19 yang masih cukup tinggi, pemulihan pasca gempa bumi, belum optimalnya koordinasi TKPK provinsi dengan TKPK kabupaten/kota serta belum optimalnya sinergitas program/kegiatan antara Organisasi Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Monitoring dan evaluasi juga bermanfaat sebagai pembelajaran bersama antara pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif. Sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pelaku atau pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Provinsi NTB, Kelompok Kerja (Pokja) Pengaduan Masyarakat.

03

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29

Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Amanat dari berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas adalah secara garis besar memerintahkan kepada Daerah untuk penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan berbagai program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. Salah satu strategi dalam penanggulangan kemiskinan adalah Sistem monitoring dan evaluasi bermanfaat untuk mengetahui output dan outcome dari berbagai upaya program/kegiatan yang sedang dan telah berjalan terkait penanggulangan kemiskinan.

04

Upaya Percepatan Pencapaian

Penguatan kapasitas lembaga dalam monitoring dan evaluasi penanggulangna kemiskinan memerlukan upaya antara lain; membangun keterpaduan dan sinergisitas dalam system monitoring dan evaluasi yang memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi secara regular dan terpillar, mengembangkan standarisasi indikator, variabel, dan data yang relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, memperluas kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengakses data dan informasi tentang kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, melaksanakan survey dan kunjungan lapangan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut sebagai respon terhadap hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskina pada masa pandemik covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah NTB tahun 2021 diantaranya adalah:

1. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh sebanyak 143 unit dengan total anggaran

Rp.32.790758.588 di Kabupaten Lombok timur sebanyak 47 unit dan Lombok Tengah sebanyak 96 unit




2. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum, sebanyak 185.178 KK yang dilayani dengan total anggaran Rp. 31.242.029.850 di kabupaten Lombok Tengah.
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap sebanyak 23 unit dengan total anggaran Rp.4.828.661.200 di kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Sumbawa Barat.
4. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp.56.566.533.935, sebanyak 70% yang telah terjangkau di Kabupaten Lombok Timur , Lombok Tengah dan Sumbawa Barat
5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, SMP.dengan anggaran Rp. 126,424,136,000 dan 748 sekolah di Kabupaten Lombok Timur
6. program perlindungan dan jaminan sosial dengan anggaran Rp.19.931.497.000 di Kabupaten Sumbawa Barat
7. Sistem Rujukan Layanan Tepadu (SLRT) dengan anggaran Rp.76.135.000 di Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Program sembako (BPNT) dengan anggaran Rp.29.538.622.000 di kabupaten Sumbawa Barat.
9. Pairs Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan anggaran Rp. 10.000.000.000.di Kabupaten Sumbawa Barat
10. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota dengan anggaran Rp.86.134.000 di Kabupaten Sumbawa Barat
11. Program rehabilitasi sosial dengan anggaran sebesar Rp. 36.000.000 untuk 18 orang/tahun di Kabupaten Sumbawa Barat.



Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Target Pencapaian Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 2.1 Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup cukup sepanjang tahun								
2.1.1*	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan	BPS	%	PM	5,77	2,97	Badan Ketahanan Pangan	
2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita/PKG AB (5)	Dinas Kesehatan	%	22,6	17,0	13,77	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan	
2.1.2*	Parvelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	%	7,54	5,13	2,97	Dinas Ketahanan Pangan	
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minuman dibawah 1400kkal/kapita/hari	BPS	%	7,54	5,13	2,97	Dinas Ketahanan Pangan	
Target 2.2 Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk pendek anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula								
2.2.1*	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)	Balitban gkes melalui kesehatan dasar (Risksedas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	37,2	33	19,23	Dinas Kesehatan	
2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak	Balitban gkes melalui	%	23,5	18	19,23	Dinas Kesehatan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	dibawah 2 tahun/baduta	kesehatan dasar (Risksedas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG						
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita	Balitbangkes melalui kesehatan dasar (Risksedas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	8,6	6,5	5.42	Dinas Kesehatan	
2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Balitbangkes melalui kesehatan dasar (Risksedas), survei indikator kesehatan nasional (sirkesnas)	%	56,5	49	12,89	Dinas Kesehatan	
2.2.2 (b)	Presentasi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi eksklusif	Balitbangkes melalui kesehatan dasar (Risksedas), BPS/Susenas	%	41,2	70	83.10	Dinas Kesehatan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
2.2.2c	Kualitas konsumsi pangan yang di indikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH Point)	DKP	%	78,3 (2018)	80,60	90,4	Dinas Ketahanan Pangan	●
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan tingkat konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	30,18	30,54	51,12	Dinas Kelautan dan Perikanan	●
2.3.1*	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sector pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Data nilai tambah pertanian BPS/Sakernas	%	32.821,82	27.250	34.662 (2020)	Dinas Pertanian dan Perkebunan	●

Keterangan : "a" adalah data realisasi; "PM" adalah *Prememory*

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Kerawanan

pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat



Prosentase penduduk rawan pangan NTB dari tahun ke tahun mengalami pluktuasi. Dari tahun 2019 – 2021 penurunan angka rawan pangan mencapai 2,29 persen, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen dibandingkan dengan tahun 2020 pada angka 2,77 persen. Hal ini menunjukkan tingkat ketersediaan pangan di NTB semakin terpenuhi. Sementara prevalensi kurang gizi di Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama dua tahun terakhir yakni dari tahun 2019 mencapai 13,54 persen dan meningkat 1,61 persen pada tahun 2020 dengan capaian 15,15 persen dan tahun 2021 mengalami penurunan Kembali dengan capaian 13,77. Hal yang berbeda terjadi pada Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) juga mengalami peningkatan dari 19,02 persen tahun 2019 menjadi 23,27 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 19,23. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemerintah untuk menurunkan angka stunting telah berhasil.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Pola konsumsi yang relatif sama pada antar-individu, antar-waktu dan antar-daerah mengakibatkan adanya masa-masa defisit dan lokasi-lokasi defisit pangan. Sehingga, mekanisme mekanisme pasar dan distribusi pangan antar lokasi dan antar waktu dengan mengandalkan stok akan berpengaruh pada kesetimbangan antara ketersediaan dan konsumsi serta pada harga yang terjadi di pasar. Faktor harga sangat terkait dengan daya beli rumah tangga terhadap pangan. Sehingga, meskipun komoditas pangan tersedia di pasar namun jika harganya tinggi sementara daya beli rumah tangga rendah



akan menyebabkan rumah tangga tidak bisa mengaksesnya. Kondisi ini memicu timbulnya kerawanan pangan.

03

Kebijakan dan Strategi

Strategi dan arah kebijakan provinsi NTB untuk mencapai target adalah meliputi; adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, mendorong



keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan, serta meningkatkan diversifikasi pangan local, dengan proram-program pemanfaatan pekarangan yang ada dirumah-rumah masyarakat.

04

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs






Pemerintah provinsi NTB terus berupaya melalui program/kegiatan untuk kebijakan pola pangan harapan meliputi peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, tersedianya lumbung pangan














masyarakat, terbina dan tertatanya kelembagaan desa mandiri pangan, memperbanyak kawasan rumah pangan lestari, serta terpantaunya arus keluar masuk komoditas pangan strategis.

Target Pencapaian Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	SDKI (2012), AKI se-Nusa Tenggara, Papua Tahun 2015	orang	251 (2012)	-	146,69	Dinas Kesehatan	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih (%)	BPS/Susenas	%	99,47	100	98,28	Dinas Kesehatan	
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan	BPS/Susenas	%	90,42	94	96,14	Dinas Kesehatan	
Target 3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN /SDKI	Orang	75 (2012)	-	842	Dinas Kesehatan	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per	BPS (Sensus	Orang	33 (2012)	-	130	Dinas Kesehatan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	1.000 kelahiran hidup	Penduduk dan SUPAS),B KKBN /SDKI						
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS),B KKBN /SDKI	Orang	57 (2012)	-	8,26	Dinas Kesehatan	
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	Dinas Kesehatan	
Target 3.3 Pada Tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV	Kemenkes	Kasus	98	59	192 (2020)	Dinas Kesehatan	
3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kemenkes	Kasus	170	120	319	Dinas Kesehatan	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	%	0,25	0,20	0,1 (2020)	Dinas Kesehatan	
3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	3	6	6	Dinas Kesehatan	
3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Kemenkes	%	90	100	100	Dinas Kesehatan	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (kusta)	Kemenkes	Orang	221	170	113	Dinas Kesehatan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
3.3.5(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta	Dinas Kesehatan	Kab/kota	0	0	7 (2020)	Dinas Kesehatan	
3.3.5(b)	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis	Dinas Kesehatan (Survey Mikro Filaria Rate/MFR), BPS	%	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan	
3.3.5(c)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I)	Dinas Kesehatan	Kab/kota	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan	
Target 3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan								
3.4.1(a)	Persentasi merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	5,9	5	4,6	Dinas Kesehatan	
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskesdas dan Sirkesnas	%	42	22,56	21,74	Dinas Kesehatan	
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	Riskesdas	%	2,00	0,80	0,60	Dinas Kesehatan	
3.4.2*	Angka kematian (Insidens rate) akibat bunuh diri	Kepolisian	Orang	13	1	0	Kepolisian	
3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Kab/kota	10	10	10	Dinas Kesehatan	
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alcohol yang membahayakan								
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan	Dinas Kesehatan, BNN	Orang	PM	351	489	BNN	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis							
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	Dinas Sosial	Orang	20 (2018)	20	108 (2020)	Dinas Sosial	
3.5.1(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti sesuai standar pelayanan	Dinas Sosial, BNN	Orang	PM	PM	10	BNN	
3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi social korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Dinas Sosial	Lemba ga	8 (2018)	11	10 IPWL (2020)	Dinas Sosial	
3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	PM	1.86	1.95	BNN	
Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas								
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	Kepolisian	Orang	PM	PM	PM	Kepolisian	
Target 3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan Pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	BKKBN	%	50,9	58,7	50,90 (2017)	BKKBN	
3.7.1(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada	BKKBN	%	50,9	52,3	58	BKKBN	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin							
3.7.1(b)	Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah PUS pada periode yang sama dan menyatakan dalam persentase	BKKBN	%	74,77	76,28	37,2 (2020)	BKKBN	▲
.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	BKKBN	%	23,7	15,78	17,51 (2020)	BKKBN	▲
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)	BKKBN	%	2,5	1,7	2.23	BKKBN	▲
<p>arget 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang</p>								
3.8.1(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	BPS/Susenas	%	6,49 (2016)	5,00	7,68 (2020)	Dinas Kesehatan	▲
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	BPS/Susenas	%	PM	PM	61,69	Dinas Kesehatan	
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan, BPJS	%	66,74	75,00	84,18	Dinas Kesehatan	
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Bappenas/Susenas	%	5,9	4,00	26,93	Dinas Kesehatan	▲
3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di	Dinas Kesehatan	%	74,05	93	94.71	Dinas Kesehatan	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
	puskesmas							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	%	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan	

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Target Angka Harapan Hidup (AHH) yang ditetapkan tahun 2021 adalah 66,78 tahun. Capaian AHH pada tahun 2021 adalah 66,69 tahun, indikator ini meningkat sebesar 0,18 tahun dibandingkan tahun 2020, dimensi hidup layak yang digambarkan oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan, capaian Provinsi NTB di tahun 2021 sebesar 10,38 juta rupiah per orang per tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 26 ribu rupiah dibandingkan tahun 2020.

Epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya mulai tahun 2019 – 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat semakin meningkat. Hal ini juga didukung dengan sarana prasarana pendukung dan tenaga kesehatan yang semakin membaik di seluruh kabupaten kota di NTB.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Pada tahun 2021 masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak semua data bisa di peroleh ditambah lagi dengan adanya pandemic covid-19 yang cukup menguras tenaga, biaya dan perhatian yang cukup tinggi dalam penanganannya. Meskipun demikian ada beberapa program yang telah mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan seperti program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak

Menular; program Obat dan Perbekalan Kesehatan; program Upaya Kesehatan Masyarakat; program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang kesemua program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Selain itu program Standarisasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma juga memiliki capaian

03

Kebijakan dan Strategi

019. Secara keseluruhan predikat adalah sedang.



Pemerintah provinsi NTB telah menginisiasi program Generasi Emas NTB (GEN), yang merupakan program terpadu berbagai sektor dengan fokus tumbuh kembang pada anak. Program ini dimulai dari pemantauan ibu hamil yang menjadi sasaran yang dilakukan oleh tenaga terlatih GEN, yaitu Kader GEN dan Pendamping Desa. Dengan Program "PARANA" yaitu Program Pasangan ramah anak, dari 8.366 sasaran program GEN yang mendapatkan intervensi GEN yaitu mendapatkan kelas parana dan multi mikro nutrient (MMN) berupa caviplex dan sasaran ini

Untuk mencapai target Angka Harapan Hidup didukung dengan 8 (delapan) program yang tersebar di Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Rumah Sakit HL Manambai, RS Jiwa Mutiara Sukma dan RS Umum Daerah Provinsi NTB.



diintervensi pada tahun 2017 – 2018, Sehingga tahun 2019 mulai untuk sertifikasi parana penentuan sasaran termasuk parana melalui penilaian skor 45 indikator, sasaran yang sudah teridentifikasi atau tersertifikasi sebanyak 3.993 dan yg sudah parana sebanyak 2009 sasaran sisanya masih dalam tahap proses penginputan.

04

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Salah satu program unggulan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pembangunan bidang social adalah revitalisasi posyandu.






Terkait dengan pelaksanaan GEN, jajaran Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB melaksanakan kegiatan Aksi Kepedulian yang dikenal dengan program Aksi Mahasiswa untuk Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang merupakan bagian dari program Aksi Seribu Hari atau disingkat ASHAR. Program GEN merupakan program jangka panjang Pemerintah Provinsi NTB, dengan tujuan pada tahun 2025 akan lahir generasi unggul, generasi emas dari NTB. Untuk tahun 2021 Program GEN adalah Program PARANA.








Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Target Pencapaian Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 4.1 pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif								
4.1.1*	Proporsi anak-anak/ anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca dan (ii) matematika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal	Badan Akreditasi	%	68,32 (2018)	69,82	72,72 (2020)	Dinas Pendidikan dan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
	B	Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					Kebudayaan	
4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	63,53 (2018)	67,49	81,40 (2020)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	74,71 (2018)	77,71	76,81 (2020)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	BPS/Susenas	%	109,63	114,94		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	107,83	108,3	106,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	BPS/Susenas	%	94,97	96,04		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	110,16	110,96	109,56 (2020)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Sederajat	BPS/Susenas	%	93,89	97,76		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dinas Pendidikan dan	%	97,93	99,95	108,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
		Kebudayaan						
4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/Susenas	%	7,66	7,87	7,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(i)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	BPS/Dinas Pendidikan	%	67,22 (2016)	68,3	80,15 (2020)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Target 4.2 pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, Pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh menempuh Pendidikan Dasar								
4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	BPS/Susenas	%	37,57 (2016)	40,75		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	75,72	80,72	80,15 (2020)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Target 4.3 pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas								
4.3.1(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat	BPS/Susenas	%	93,89	93,76		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,93	99,95	102,21 (2020)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.3.1(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS/Susenas, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	%	21,57 (2016)	24,9	32,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Target 4.4 pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan								
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-24 tahun dengan keterampilan	BPS	%	46,63 (2016)	64,34	53,72 (2020)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)							
Target 4.5 pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama pada semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan								
4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	BPS/Susenas	%	100,57	100,54	98,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki SMP/MTs/ Sederajat	BPS/Susenas	%	99,75 (2016)	100	85,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki SMA/SMK/MA/ Sederajat	BPS/Susenas	%	86,18 (2016)	90	67,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/laki-laki di PT (%)	BPS/Susenas	%	118,84 (2016)	154,21	95,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
Target 4.6 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi								
4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/Susenas	%	87,14	94,36	86,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
4.6.1(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	BPS	%	100	100	99,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Indeks Pembangunan Manusia Dalam setiap periode pemerintahan selama lima tahun, pembangunan manusia menjadi prioritas pemerintah dengan indikator pencapaiannya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peningkatan IPM dijadikan sebagai salah satu target

bagi perwujudan Visi “NTB Gemilang” kaitannya dengan pembangunan manusia melalui program unggulan di sejumlah sektor terkait. Capaian IPM Provinsi NTB dalam 10 tahun terakhir cukup menggembirakan dan terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 68,25 di tahun 2020 menjadi 68,65 pada tahun 2021. IPM Provinsi NTB masih berada pada kategori capaian sedang. Pertumbuhan IPM Provinsi NTB di tahun 2021 mencapai 0,59 persen. Dari dimensi kesehatan yang digambarkan oleh indikator Umur Harapan Hidup, di tahun 2021 Provinsi NTB mencapai 66,69 tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 0,18 tahun dibandingkan tahun 2020. Dimensi pendidikan digambarkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. HLS Provinsi NTB di tahun 2021 Provinsi NTB mencapai 13,90 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan tahun 2020. Sedangkan RLS-nya sebesar 7,38 tahun dan nilai ini meningkat sebanyak 0,07 tahun dibanding tahun sebelumnya. Dari dimensi hidup layak yang digambarkan oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan, capaian Provinsi NTB di tahun 2021 sebesar 10,38 juta rupiah per orang per tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 26 ribu rupiah dibandingkan tahun 2020.

Meski laju pertumbuhan IPM NTB selalu berada di atas laju pertumbuhan IPM Nasional, namun level capaian IPM Provinsi NTB masih berada di bawah level Nasional. Selisih IPM Provinsi NTB dengan Nasional pada tahun 2010 masih cukup lebar yaitu sebesar 11,13 poin. Seiring dengan berjalannya waktu, selisih ini semakin menipis menjadi 3,64 poin pada tahun 2021. Artinya, NTB semakin berbenah dan berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan manusia agar paling tidak bisa sejajar dengan Nasional. Ke depan, upaya yang lebih keras diperlukan agar jarak ketertinggalan dengan rata-rata IPM nasional semakin menipis.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Meningkatnya IPM Provinsi NTB disebabkan oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), pengetahuan (HLS dan RLS),

serta dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan). Secara keseluruhan kinerja capaian program yang mendukung indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah berada pada

03 Kebijakan dan Strategi

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan selain untuk mendukung pencapaian indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, juga untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah: Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas) tahun 2021 sebesar 100 persen dari target capaian 100 persen dan indikator persentase digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul) sebesar 32,76 dari target 31,89 persen.

04 Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Salah satu program Pemerintah provinsi NTB untuk percepatan pencapaian adalah dengan memberikan beasiswa kepada siswa-siswa miskin baik itu di dalam negeri maupun dengan mengirim putra/putri NTB sekolah ke Luar negeri sampai dengan tahun 2021 sebanyak 411 orang.








Tujuan 5. Kestaraan Gender



Target Pencapaian Tujuan 5 Kestaraan Gender

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh	DP3AP2K B Provinsi NTB	%	0,069	0,063		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
	pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.						Keluarga Berencana	
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Sosial	Anak	301	174	462	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial	▲
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DP3AP2K B Provinsi NTB	%	0,014	0,015	0,123	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial	▲
5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	BPS melalui SPHPN	%	0,035	0,044	0,044	Dinas Sosial	●
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 15 tahun	BPS/Suse nas	%	0,62 (2016)	0,1	Tidak rilis BPS	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup	BPS/Suse nas	%	18.86 (2016)	9	Tidak rilis BPS	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Pena nggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	bersama sebelum sebelum umur 18 tahun.						Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BKKBN	%	20 (2016)	19,8	-	BKKBN	
5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	BPS melalui SDKI atau BPS melalui SP dan SUPAS	%	75 (2012)	-	-	BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS melalui Susenas	%	91.25 (2016)	97.76	108,52		
Target 5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara Nasional								
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	BPS	%	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPD dan DPR)	KPU Provinsi NTB	%	21,43 (2014)	11	18,18	KPU	
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat Parlemen daerah (DPRD Provinsi NTB)	KPU Provinsi NTB	%	9.23 (2014)	65	1.54	KPU	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKD, BPS melalui Sakernas	%	PM	PM	41,30	BKD	
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidu dari konferensi-konferensi tersebut								
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan	BKKBN, BPS melalui SDKI	%	77,9 (2012)	-	Tidak Rilis BPS	BKKBN	
5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang kontrasepsi modern).	BKKBN	%	15,6	7,08	16,4	BKKBN	
5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BKKBN	%	99,6	100	90	BKKBN	
	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual	Biro Hukum, BKKBN, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UU / PP	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN	
Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.								
5.a.1	Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut	BPS	%	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Pena nggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	jenis kepemilikan						Keluarga Berencana	
5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	BPN	%	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, BPN	
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS melalui Sesenas	%	48,96	58,7	85,73	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.								
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberda yaan, Perlindun gan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencan a	OPD	2	2	-	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana	

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami peningkatan, dalam 3 (tiga) tahun terakhir, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2020 meningkat 55,05 persen bila dibandingkan dengan kasus tahun 2019, sedangkan tahun 2021 meningkat 25,44 persen bila dibandingkan dengan kasus tahun 2020. Pelaku kekerasan khususnya kekerasan seksual pada anak paling besar dilakukan oleh orang tua

kandung, paman dan kakek dari korban. Sedangkan kekerasan yang di alami oleh perempuan dewasa banyak dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

02

Tantangan dan Pembelajaran

Pada tahun 2020 untuk capaian indikator IPG sebesar 90,45 point melampaui target 2020 (90,43 point) dan capaian IPG tahun 2019 (90,40 point). Sementara untuk capaian IDG dan persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan adalah 51,96 dan 26,87. Sehingga target capaian IPG adalah 100,02% untuk IDG 89,88 dan 139,44% persentase 10 partisipasi perempuan dalam pembangunan. Capaian indikator cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kabupaten/kota layak anak tahun 2020 sebesar 40 persen sama dengan target, sementara capaian indikator Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan tahun 2021 sebesar 100 persen, hal ini disebabkan karena jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak melampaui target dan semua laporan tersebut telah tertangani..

03

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah NTB adalah ; perkuatan kelembagaan PUG dan anak melalui keserasian kebijakan pembangunan, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

04

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 90 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana teknis Dinas Lingkup Provinsi NTB, pada tahun 2020 telah diresmikan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan






Perempuan dan Anak (UPT-PPA) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dirujuk dari kabupaten/kota. Selain itu, melalui APBD perubahan untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, telah didirikan UPTD bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten 9 Kabupaten/Kota kecuali Kota Mataram yang belum memiliki. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi NTB dalam upaya mencegah, menangani dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan koordinasi dengan Kab/Kota, Aparat Penegak Hukum, perangkat daerah terkait, UPTPPA, Desa/kelurahan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya.












Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Target Pencapaian Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua..								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS : Susenas	%	69.58 (2016)	77.95	78,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penataan	
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PU	Liter /detik	299,196	299,196	299,196	Dinas PU	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas PU	%	74.20	82.80	78,76	Dinas PU	
Target 6.2 Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	BBPS : Susenas (Modul Kesehatan dan Perumahan)	%	43,07 (2016)	54,6	85,42	Dinas Kesehatan	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	BPS :Susenas	%	58,31 (2016)	68,78	78,76	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Desa/ Kelurahan	1100	1100	1137	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
6.2.1.(d)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota,kawasan dan komunal.	Dinas PU	Kab/Kota	10	10	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
Target 6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat	Kab/Kota	1	1	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi	Dinas	PM	PM	PM	PM	Dinas ESDM	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	penggunaan air tanah.	ESDM						
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas ESDM	PM	PM	PM	PM	Dinas ESDM	
Target 6.5 : Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas LHK	Jumlah RPDAST	1	1	1	Dinas LHK	
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Stasiun	62	62	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Kegiatan	1	1	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding(MoU) lintas Negara.	Dinas LHK	DAS	1	-	NA	Dinas LHK	
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas LHK	Ha	200	200	200	Dinas LHK/BPDASHL Dodokan Moyosari	
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan	Wilayah sungai	PM	PM	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
	tangkapan sungai dan danau	Infrastruktur						
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Lembaga	25	44	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Dinas LHK	DAS	2	1	1	Dinas LHK/BPDASHL Dodokan Moyosari	
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Dinas LHK	DAS	1	2	2	Dinas LHK/BPDASHL Dodokan Moyosari	
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Dinas LHK	Danau	1	1	1	BPDASHL Dodokan Moyosari	
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Dinas LHK	NA	1	1	1	BPDASHL Dodokan Moyosari	
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Dinas LHK	NA	1	1	1	BPDASHL Dodokan Moyosari	
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dinas LHK	NA	4090	6000	6210	BPDASHL Dodokan Moyosari	
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas LHK	DAS	2	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/BPDASHL Dodokan Moyosari	

Kondisi cakupan akses air minum bersih pada tahun 2021 sebesar 78,76 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 80,02 persen. Indeks kualitas air yang cenderung menurun berkaitan dengan bagaimana pengolahan sampah yang dilakukan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, dan belum optimalnya upaya pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbahnya sesuai dengan baku mutu. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan juga mengalami penurunan.

Nilai indeks kualitas air (IKA) yang cenderung menurun dan berada pada kategori “Kurang Baik” dalam tiga tahun terakhir. Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Terdapat penurunan nilai IKA sebesar 5,88 poin dari Tahun 2020 ke 2021. Penurunan nilai IKA diindikasikan adanya sumber pencemaran dari kegiatan domestik masih dominan sebagai penyebab penurunan kualitas air dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketersediaan air baku yang tidak merata dan banyaknya mata air yang hilang maupun tertutup akibat kerusakan tutupan lahan di daerah resapan dan tanah longsor akibat gempa menjadi tantangan dalam penyediaan layanan air bersih/minum. Di banyak lokasi juga didapatkan, bahwa infrastruktur penyediaan air minum terutama dari jaringan perpipaan banyak yang tidak berfungsi karena sambungan ilegal dari oknum-oknum yang dilewati oleh jaringan pipa dan tidak berfungsinya lembaga pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sehingga infrastruktur tidak berfungsi secara berkelanjutan.

Penurunan kualitas air juga disebabkan oleh aktivitas manusia yang memanfaatkan air sungai untuk usaha pertanian, usaha peternakan/perikanan, industri, dan keperluan rumah tangga. Air sungai menjadi tidak layak lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mendukung ekosistem sehingga diperlukan upaya pemulihan agar dapat layak digunakan. Selain itu, tingginya nilai E Coli disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan badan sungai sebagai lokasi buang air besar (BAB) dan tempat pembuangan limbah padat/sampah maupun limbah cair.

Dalam penyediaan layanan air bersih/air minum bagi masyarakat dibutuhkan kerjasama antar daerah dari tingkat kabupaten sampai ke desa. Kesadaran kolektif kita untuk menjaga kelestarian lingkungan juga wajib untuk ditingkatkan, karena potensi dan ketersediaan sumber air baku ini sangat bergantung pada kelestarian alam. Dalam hal perubahan perilaku, pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah memberikan perubahan yang cukup besar diindikasikan dengan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM di Provinsi NTB.

03

Kebijakan dan Strategi

Cakupan air minum menjadi salah satu indikator utama dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023, Penyelenggaraan SPAM Regional menjadi jalan keluar jangka panjang yang harus diwujudkan untuk mengatasi permasalahan kekeringan yang kita hadapi tiap tahun di NTB serta Pembentukan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) dan BUMDES yang akan mengelola SPAM yang dibangun di desa.

Kolaborasi dan sinergi antar sektor dalam penyediaan air bersih/minum, karena sumber pendanaan untuk infrastruktur air bersih/minum itu dari berbagai sumber seperti: Pengembangan SPAM dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB, Program PAMSIMAS, DAK Air Minum, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBD Desa, program dari CSR Swasta dan BUMN, dan NGO.



Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Target Pencapaian Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
7.1 Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau andal dan modern.								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas ESDM	%	87,78 (2018)	91,8	99,98	Dinas ESDM	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas ESDM	kwh	579,05	657,78	NA	Dinas ESDM	
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS melalui Susenas	%	54,76	54,21	79,52	Dinas ESDM	

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Sampai Tahun 2021 ketenagalistrikan dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan target setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi kelistrikan di Provinsi NTB saat ini semakin baik baik dari sisi penyediaan pembangkit, distribusi jaringan hingga kualitas listrik yang diikmati oleh masyarakat. Peningkatan rasio elektrifikasi selama tiga tahun terakhir juga dibarengi adanya pemerataan distribusi listrik yang lebih merata. Tercatat sejak tahun 2019 berdasarkan data PLN rasio desa berlistrik sudah mencapai 100 persen dari jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.143. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.138 desa/kelurahan

mendapatkan listrik dari sumber PLN sedangkan 5 desa sisanya mendapatkan listrik dari sumber Non PLN.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Rasio elektrifikasi pada tahun 2021 sebesar 99,98%, namun demikian kenyataannya di beberapa daerah masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik terutama masyarakat miskin dan daerah terpencil dan perbatasan di samping itu juga perhitungan rasio elektrifikasi sebagian besar mengandalkan dari data jumlah pelanggan PLN yang belum memperhatikan klasifikasi berdasarkan identitas pelanggan PLN. Sehingga perhitungan jumlah masyarakat yang belum mendapatkan layanan listrik belum menggambarkan kondisi aktual di lapangan

03

Kebijakan dan Strategi

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian rasio elektrifikasi adalah program pengelolaan energi terbarukan dengan indikator kinerja persentase kontribusi energi terbarukan dalam pembangkit listrik dipengaruhi oleh kinerja PLN bersama mitra strategis lainnya seperti Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM dan Independen Power Producer (IPP) sebagai pemilik pembangkit listrik EBT Swasta. Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi NTB berperan dalam fasilitasi peningkatan kontribusi EBT dalam pembangkit listrik.

04

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Program pengelolaan keternagalistrikan dengan kegiatan pemasangan listrik murah dan hemat yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 yang dananya bersumber dari APBN, APBD dan CSR Perusahaan. Sampai dengan tahun 2021 sudah terpasang 29.389 listrik murah dan hemat bagi masyarakat miskin yang rumahnya sudah dilalui oleh jaringan listrik namun belum mendapat akses listrik maupun sudah mendapat layanan layanan listrik








tapi bersumber dari tetangganya. Kemudian dari sisi pembangkitan, Pemerintah Provinsi NTB sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional telah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan target pada tahun 2025 23% dari kebutuhan energi Daerah dipenuhi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) termasuk energi listrik. Pemerintah bersama PLN telah berkoordinasi dan mendorong adanya peningkatan peran EBT. Capaian EBT dalam pembangkit listrik pada tahun 2021 sebesar 6,7% dari target sebesar 5,96%, capaian tersebut diperoleh dari adanya penambahan 4 PLTS Komunal IPP dengan total daya 22,4 Mwe.



Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan

Target Pencapaian Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%	-1,09	0,93	3,16	Semua OPD	●
8.1.1. (a)	PDB per kapita	BPS	Rupiah (ADH Berlaku)	25.008	32.855	26.002,48	Semua OPD	▲
8.2: Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS melalui Sakernas	%	PM	PM	-0,83	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS melalui Sakernas	%	58.42 (2016)	59,03	62,67	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan	●
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS melalui	%	35,93	39,35	26,11	Dinas Tenaga Kerja dan	▲

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
		Sakernas					Transimigrasi	
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS melalui Sakernas	%	96,81	96,05	97,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan	
8.5 : Pada Tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS melalui Sakernas	Rupiah	10.628 (2016)	11.300	12,36	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS melalui Sakernas dan Sensus Penduduk	%	3,32	3,21	4,22	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS melalui Sakernas dan Sensus Penduduk	%	17,27	17,12	16,63	17,12	
Target 8.6 Pada Tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS melalui Sakernas	%	19.53 (2016)	16	20,78	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
8.9 : Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	orang	1.858.242	5.696.877	11.890	Dinas Pariwisata	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS melalui Susenas	orang	2.215.211	6.537.574	932.146	Dinas Pariwisata	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua								
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	BI/LKP BU, OJK, BPS	Bank/ ATM	31/896 (2015)	PM	PM	BI/OJK	
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS/St atistik Potensi Desa (Podes)	Km	PM	PM	PM	BI/OJK	
8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak	BI/OJK	orang	PM	PM	PM	BI/OJK	

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Ekonomi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 terhadap tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,94 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 67,60 persen. Ekonomi Nusa Tenggara Barat triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,16 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,14 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,72 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 3,01 persen, turun 1,21 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Jika dibandingkan dengan Februari 2021 juga mengalami penurunan 0,96 persen poin. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 2,74 juta orang, mengalami peningkatan 50,50 ribu orang dibanding Agustus 2020. Apabila

dibandingkan Agustus 2020, penurunan penduduk bekerja terjadi pada status pekerja bebas di pertanian (1,51 persen poin), pekerja keluarga/ tidak dibayar (0,61 persen poin), buruh/karyawan/pegawai (0,23 persen poin), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (0,21 persen poin), dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (0,19 persen poin). penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu 42,93 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas 12,96 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Februari 2021 maupun Agustus 2020.

Pembangunan sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrument peningkatan perolehan devisa serta turut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrument dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi penduduk sekitar destinasi pariwisata. Meskipun target kunjungan wisata tidak terpenuhi pada tahun 2021, tetapi Provinsi NTB optimis dengan adanya pengembangan KEK Mandalika dan Kawasan samota yang terus berbenah.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Pandemi Covid-19 yang masuk di Indonesia pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Sektor pariwisata yang sangat merasakan dampaknya adalah sektor akomodasi dan penyediaan usaha perjalanan pariwisata termasuk juga pemandu wisata. Pada awal Pandemi covid-19 otomatis terhenti sebagai dampak dikeluarkannya kebijakan lockdown kewilayahan dan pembatasan aktivitas masyarakat. Banyak destinasi wisata yang ditutup, bandara sebagai pintu masuk juga mengalami pembatasan penerbangan sehingga otomatis tidak ada pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain.

Sektor pariwisata di Provinsi NTB menjadi program prioritas dengan mengusung branding *Pesona Lombok Sumbawa* sebagai turunan dari program pusat dalam pembangunan pariwisata Indonesia yaitu "*Pesona Indonesia*". Memaksimalkan potensi budaya, alam serta karakter masyarakat yang religius merupakan modal yang kuat untuk pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Gelar Destinasi Pariwisata Halal yang telah disandang Nusa Tenggara Barat, semakin memperkuat arah pengembangan Pariwisata Nusa Tenggara Barat. Pembangunan pariwisata dirasakan di daerah terus berkembang yang dirasakan oleh para pelaku dan pemangku kepentingan. Masyarakat secara perlahan menerima dampak positif pembangunan pariwisata terutama dalam hal kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Strategi pembangunan kepariwisataan di Provinsi NTB dilakukan melalui :Pengembangkan destinasi kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah; Mengembangkan industri pariwisata yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Mengembangkan kelembagaan dan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan tata kelola destinasi yang nyaman dan aman, Mengembangkan promosi dengan menggunakan Teknologi digital sebagai respon dari tools pemasaran pariwisata "*Low Budget High Impact*".

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kunjungan wisatawan tahun 2018 dengan melakukan standarisasi fasilitas umum pada destinasi wisata secara bertahap, meningkatkan fasilitas pariwisata, baik kuantitas maupun kualitas, peningkatan kualitas infrastruktur menuju destinasi serta mengupayakan konektivitas dari pasar potensial serta

didukung dengan peningkatan mutu SDM Pariwisata. Melakukan promosi pariwisata yang terpadu, efektif, efisien dan berkualitas dan memperbanyak event promosi yang mengangkat potensi Nusa Tenggara Barat dan citra kawasan pariwisata daerah.

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan, Dilaksanakan dengan terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku, Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.





Adanya pengembangan KEK Mandalika memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 60% untuk tenaga kerja lokal dan 40% untuk tenaga kerja non lokal dan asing. Terlebih lagi pada akhir tahun 2021 dilaksanakan WSBK di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang tentunya memberikan dampak terhadap peningkatan tenaga kerja di sector-sektor pariwisata baik didalam maupun diluar kawasan KEK Mandalika. Mandalika menjadi magnet pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Barat yang diharapkan memberikan dampak penguatan destinasi, peningkatan angka kunjungan wisatawan, penggunaan tenaga kerja serta pengembangan daya tarik pariwisata.



Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Target Pencapaian Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1	Jalan Mantap Provinsi	Dinas PU	%	-1,09	0,93	83.95	Dinas PU	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Pelabuhan Penyeberangan	7	10	10	Dinas Perhubungan	
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan	Pelabuhan	7	8	8	Dinas Perhubungan	
9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS : Survei Industri Besar dan Sedang dan Survei Makro dan Kecil	%	4.2 (2016)	4.5	-2,48	Dinas Perindustrian	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	BPS	%	PM	PM	Tidak Rilis BPS	Dinas Perindustrian	
	Pertambahan nilai sector industry pengolahan	Dinas Perindustrian	Rp (Milyar)	-	166,39	94,66	Dinas Perindustrian	
Target 9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS, Dinas Perindustrian	%	PM	PM	PM	Dinas Perindustrian	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Komite Kebijakan KUR	Rp (Juta)	PM	PM	PM	Dinas Perindustrian	
Target 9.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Dinas LHK	%	1,27	0,93	NA	Dinas LHK	
9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan								
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Bappeda	%	PM	PM	PM	Bappeda	
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	Bappeda	Orang	PM	PM	PM	Bappeda	
9.C. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020								
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi dan Informatika	
9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS melalui Susenas	%	48	58	56,36 (2020)	Dinas Komunikasi dan Informatika	
9.C.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	BPS melalui Susenas	%	21	39	39,16 (2019)	Dinas Komunikasi dan Informatika	

01 Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Pengembangan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan kontribusi PDB industri pengolahan yang lebih tinggi. capaian pertumbuhan industri pada tahun 2021 sebesar 1,80%. Provinsi NTB merupakan daerah pariwisata, sehingga sebagian besar perekonomian digerakkan sektor pariwisata. Rendahnya angka pariwisata sudah tentu berimbas pada angka pertumbuhan industri mengingat di provinsi NTB belum menjadi daerah industri dengan skala yang besar. Sedangkan pencapaian nilai PDRB sektor industri dari angka yang telah ditargetkan Rp. 166,39 milyar tercapai sebesar Rp. 94,66 milyar. nilai PDRB sektor industri tahun 2021 sebesar 4,442,85 milyar atau tumbuh sebesar 94,66 milyar dari tahun sebelumnya yaitu 4.348,20 milyar tahun 2020. Pertumbuhan industri yang merupakan

gambaran umum perekonomian masyarakat kecil mampu tumbuh sebesar 6,75 persen dari target sebesar 6,50 persen.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Upaya untuk meningkatkan daya saing industri; meningkatkan kualifikasi IKM; dan meningkatkan pertumbuhan IKM. Peningkatan kualifikasi IKM merupakan upaya mendorong industri kecil yang telah ditumbuhkan oleh Kabupaten/Kota sebagai jembatan untuk menaikkan skala usaha industri menjadi skala industri menengah melalui kerjasama antara Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian di masing-masing Kabupaten/Kota dalam menumbuhkan industri baru mutlak diperlukan. Selain itu, konsep industrialisasi yang mendorong pengolahan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk menjadi sasaran yang harus menjadi acuan perencanaan di Kabupaten/Kota. Seluruh potensi lokal harus diolah dengan menggunakan permesinan sehingga dapat terstandarisasi dan diproduksi secara massal. Peningkatan skala produksi akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing produk pelaku industri. Peningkatan daya saing ini akan secara simultan mendorong meningkatnya nilai PDRB sektor industri terhadap PDRB NTB secara keseluruhan

Perkembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata belum maksimal seperti yang diharapkan dalam menanggulangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya yang tinggal di lingkaran destinasi.

03

Kebijakan dan Strategi

Untuk mempersiapkan Industrialisasi Permesinan, sudah melakukan: Tenaga Kerja untuk mendukung permesinan sudah dilatih dalam rangka mempersiapkan tenaga ahli dibidangnya, sebanyak 94 IKM, Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja dibidang permesinan, sebanyak 94 IKM, Memfasilitasi peralatan pengolahan pangan, sebanyak 222 IKM,

Program inkubasi bisnis “sekolah wirausaha baru” selama 2 tahun, sebanyak 20 IKM, (sedang proses pembelajaran In 1), Program rintisan produksi mesin dan rintisan karoseri truck, dalam tahap pembelian material pabrikasi .

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua melalui pembangunan jalan provinsi, dermaga penyebrangan dan pelabuhan startegis . Pemerintahan NTB periode 2019-2023 memprioritaskan program industrialisasi untuk lima tahun kedepan.

04 Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam mendorong untuk meningkatkan jumlah industri di Provinsi NTB, dilakukan melalui kolaborasi antara beberapa perangkat daerah yaitu Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas kelautan dan perikanan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi dan UKM, dimana dinas perindustrian sebagai lokomotif terbentuk dan berkembangnya di sektor Industri, baik Industri olahan maupun industri permesinan.




Pembangunan infrastruktur konektivitas dipercepat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di NTB dan meningkatkan efisiensi ekonomi.





Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Target Pencapaian Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenganggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS melalui Susenas	%	0.371	0,365	0,381	Semua OPD	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS melalui Susenas	%	14,75 (2018)	11,75	14,14	Semua OPD	
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	BPS : Potensi Desa (PODES)	Kabupaten	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	BPS	%	3.62 (2014)	PM	73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil	
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	BPS	%	4.22 (2014)	PM	52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil	
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS melalui Susenas	%	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil	
10.2 : Pada Tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	BPS melalui Susenas	%	PM	PM	0,34 (2020)	Dinas Sosial	
10.3: Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakann dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut								
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS : IDI	%	79,40	89,4	78,38	Bakesbangpold agri	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan	Komisi Nasional Anti	Kebijakan	PM	PM	PM	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
	pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kekerasan Terhadap Perempuan					Perempuan	
10.4 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetara								
10.4.1.(b)	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	orang	68.832	95.14 5	265.910	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala								
10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	Dokumen	8	16	23 (2020)	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	

01

Kedaaan dan Kecenderungan (Tren)

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah gini ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0 – 1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB yang diukur oleh gini ratio tercatat sebesar 0,384 pada September 2021. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2021 yang sebesar 0,381 namun jika dibandingkan dengan gini ratio September 2020 yang sebesar 0,386, maka giniratio September 2021 turun sebesar 0,002 poin. Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,420 dan untuk daerah perdesaan sebesar 0,331

02

Tantangan dan Pembelajaran

Selain gini ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen

terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. selain gini ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,59 persen, yang berarti Provinsi NTB berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada September 2021 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 17,35 persen

03

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga ada upaya yang sistematis untuk mengurangi angka kemiskinan di NTB, disamping itu juga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus selalu diperbaharui sehingga sasaran penanggulangan bisa tepat. Untuk mengkondisi dan permasalahan kemiskinan di setiap wilayah sangat beragam dan spesifik, untuk itu butuh kebijakan dan strategi yg berbeda. Begitu juga kondisi keparahan kemiskinan dari setiap wilayah sangat beragam sehingga ada wilayah yang mendesak segera di tangani dan ada juga wilayah yang masih bisa ditunda penanganannya.

04

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dianalisis oleh TKPKD Provinsi NTB yang meliputi laporan rutin OPD pelaksana kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, pendataan oleh BPS, penelitian dan kajian kemiskinan daerah yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya, pemberitaan media massa, hasil koordinasi dengan TKPKD Kabupaten/Kota se-NTB, dan laporan kelompok masyarakat. Tim TKPKD menyiapkan rencana tindak lanjut hasil monitoring




dan evaluasi yang dilaksanakan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Laporan hasil monitoring dan evaluasi juga memuat rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah untuk ditindaklanjuti.



Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Target Pencapaian Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 11.1 : Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan								
11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS melalui Susenas	%	96,52 (2016)	100	62,90	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat	▲
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	PUPR	Kawasan perkotaan metropolitan	PM	PM	PM	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat	
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PUPR	Kota sedang & Kota Baru	PM	PM	PM	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat	
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2.1.(a)	Persentase pengguna modaltransportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan	%	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan	
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penangan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	%	PM	PM	PM	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas PU dan	Metropolitan	PM	PM	PM	Dinas PU dan Infrastruktur, Dinas	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
		Perumahan Rakyat.					Perumahan dan Pemukiman Rakyat	
11.3.2.(a)	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappeda	institusi	PM	PM	PM	Bappeda	
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Lemba ga	11	11	-	Dinas PU dan Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas PUPR	Kota	1	1	-	Dinas PU dan Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	orang	8	2	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	%	PM	PM	128,05 (point)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Desa/ Kelurahan	5	4	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta	Badan	EWS	1	2	1	Badan Penanggulangan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
	kebencanaan.	Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PU dan Perumahan Rakyat, Dinas ESDM.					n Bencana Daerah (BPBD)	
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Rupiah	PM	PM	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas LHK	%	39.72	60	39,68	Dinas LHK	▲
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas LHK, PU	Kota Hijau	PM	PM	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Perkim dan LHK	
Target 11.7 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas PU dan Perumahan Rakyat, LHK	Kota	10	-	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Perkim dan LHK	
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS melalui Susenas	%	12.87 (2016)	13.16	0,08 (2019)		
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030								
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen	BPBD	%	90	100	2 (2020)	BPBD	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	strategi pengurangan risiko bencana.							
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana(PRB) tingkat daerah.	BPBD	%	2 (2015)	-	-	BPBD	

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2021 yang tersebar di lima kabupaten/kota telah mencapai 39.22 persen. Lima kabupaten/kota tersebut meliputi Kabupaten Lombok Timur 543 unit, Kabupaten Lombok Tengah 285 unit, Kabupaten Lombok Barat 75 unit, Kabupaten Lombok Utara 20 unit dan Kota Mataram 45 unit. Dengan alokasi anggaran program BSPS sebesar Rp19,36 Milyar, setiap penerima bantuan akan memperoleh dana stimulan senilai Rp20 juta dengan rincian Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Pada indikator kinerja Persentase terbentuknya Destana dan SMAB pada tahun 2021 menjadi 25,48 dan 40,09 pada akhir periode RPJMD Tahun 2023, dimana sebelumnya dinyatakan dalam bentuk jumlah desa dan jumlah sekolah atau madrasah. Begitu pula dengan indikator Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, dan Jitupasna dimana sebelumnya dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan salah-satu program unggulan dari pemerintah NTB.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Untuk mempermudah informasi kondisi perumahan di NTB diperlukan sitem informasi manajemen secara online dalam bentuk Aplikasi Sistem Informasi Perumahan. Sesuai Undang-undang Keterbukaan Publik Nomor 14

Tahun 2008 Pasal 3 Poin d, Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang baik, transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah mengetahui kondisi perumahan secara pasti serta proses pengajuan usulan bantuan dapat efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sasaran bantuan tepat sasaran. Penyelenggaraan Sistem Informasi ini perlu didukung oleh semua pihak baik Pemerintah maupun para pelaku pembangunan serta masyarakat, sehingga Sistem Informasi ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

Belum optimalnya Langkah-langkah penyelesaian secara simultan dan terencana dengan melibatkan semua pihak terkait dalam upaya perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari responsif ke pengurangan risiko bencana adalah satu langkah yang cukup maju dalam mengerahkan segala potensi yang ada. Edukasi dan literasi kebencanaan masih perlu terus digaungkan hingga menyebar di seluruh aspek dan sektor pembangunan.

03

Kebijakan dan Strategi

Koordinasi pendataan dengan kabupaten/kota terkait updating data rumah tidak layak huni. Meningkatkan Anggaran Pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi Masyarakat berpenghasilan rendah. Diperlukan pelibatan Kepala Desa dan pekerja dari lokasi setempat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat salah satu program teknis yaitu Program Penanggulangan Bencana yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Perencanaan BPBD Provinsi NTB ke dalam tiga kegiatan serta beberapa sub kegiatan. Program Penanggulangan Bencana pada tahun 2021 yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka untuk percepatan pelaksanaan pembangunan pada sektor perumahan dan permukiman Pemerintah Provinsi NTB melalui OPD Teknis melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan dan Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (RLH) yang pendanaan bersumber dari APBD Provinsi NTB.

Dalam hal pengurangan resiko bencana maka upaya yang dilakukan adalah dengan Pembinaan dan pelatihan personil teknis secara proporsional, Pemenuhan sarana/prasarana penanggulangan bencana secara memadai, dan memaksimalkan peran Forum PRB sebagai wadah koordinasi lintas sector serta Diseminasi Pengurangan Risiko Bencana dalam peningkatan fungsi lingkungan



Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Target Pencapaian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 12.1 : Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.								
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwinsprogram.	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER	Kolaborasi tematik	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Target 12.2 : Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.								
12.2.1	Jejak material (material footprint).terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER		PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Target 12.3 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.								
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas	%	PM	PM	PM	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
		Ketahanan Pangan						
Target 12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER	Peserta Proper	14	15	12	Dinas LHK	▲
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas LHK	Ton	1226	1.795	30.379.928,47	Dinas LHK	●
Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali (3R)								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas LHK	%	6,75	22	9,340	Dinas LHK	▲
Target 12.6 : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas LHK	Perusahaan	PM	PM	7 (2020)	Dinas LHK	
12.8 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di manapun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan								
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas LHK	Fasilitas Publik	PM	PM	PM	Dinas LHK	

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Tahun 2021 persentase pengurangan sampah mencapai 9,34% atau meningkat 2,15 poin dari tahun sebelumnya. Upaya pengurangan sampah ini didukung dengan penambahan beberapa sarana prasarana antara lain lubang biopori sumur biopori, komposter bag, TPS3r, BSF Mandiri, dan pengelolaan sampah skala rumah tangga pada beberapa lokasi. Sedangkan

persentase penanganan sampah per Desember 2021 terhitung sebesar 39,68% atau naik 2,05 poin dari tahun sebelumnya. Hasil akhir dari pemrosesan sampah pada TPA dimanfaatkan menjadi biogas untuk energy dan lindinya diolah kembali ke dalam IPAL agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Permasalahan pembuangan limbah menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sampah di Provinsi NTB menjadi ancaman yang serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Sampah telah mencemari perairan seperti sungai, waduk, bendung, laut, dan juga tempat-tempat strategis seperti pantai, jalan, dan yang lainnya. Hal ini akan berimbas ke sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan sebagai penopang ekonomi masyarakat NTB. Permasalahan lainnya dalam pengelolaan sampah di Provinsi NTB adalah Belum tersedia data infrastruktur pelayanan persampahan berbasis desa, Minimnya dukungan Kabupaten/Kota karena masih fokus pada penanganan sampah, Skema pengurangan sampah berbasis desa, sedangkan saat ini Pemdes masih fokus BTT untuk stimulus ekonom dan Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya reduce, reuse, recycle).

03

Kebijakan dan Strategi

Pengelolaan sampah berkelanjutan yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya melalui 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) dan ekonomi sirkular. Progress penanganan dan pengurangan akan didorong berbasis desa, untuk memastikan pengelolaan sampah yang lebih efektif dari sumbernya. Selain implementasi 8 (delapan) pilar zero waste yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, berbagai inisiatif yang sudah dilakukan adalah membentuk Satgas ZW untuk melakukan edukasi dan penanganan timbulan sampah illegal, gerakan Eco Office, Aplikasi LESTARI, NGOBRAS (Ngobrol Asyik Tentang Sampah), Forum Diskusi kelola sampah berupa

TANYA LESTARI melalui Telegram, kebijakan tentang penggantian bunga kertas dengan bunga hidup (tanaman hidup) dan kebijakan WAJIB pilah sampah bagi pengangkut sampah mandiri yang masuk ke TPA Regional. Berbagai inisiatif lainnya muncul dari Lurah dan Kepala Desa untuk mendorong terwujudnya NTB Bersih, antara lain Rumpil Inges (Rumah Pilah) oleh Lurah Mataram Timur, Pengelolaan Sedekah Sampah oleh Kades Lendang Nangka, Deklarasi menjadi salah satu Desa Terbersih di dunia oleh Desa Lnyuk Ode.

04

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Tahun 2021 persentase pengurangan sampah mencapai 9,34% atau meningkat 2,15 poin dari tahun sebelumnya. Upaya pengurangan sampah ini didukung dengan penambahan beberapa sarana prasarana antara lain lubang biopori sumur biopori, komposter bag, TPS3r, BSF Mandiri, dan pengelolaan sampah skala rumah tangga pada beberapa lokasi.



Tujuan 13. Penanganan Perubahan

Target Pencapaian Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah..	BPBD	dokumen	2 (2015)	-	2	BPBD	
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	8	2	8	BPBD	

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Tren peningkatan suhu udara 0,5⁰C pada tahun 2030, Curah hujan pada musim kemarau diproyeksikan semakin berkurang sekitar 20% dari

kondisi saat ini. Peningkatan nilai suhu rata-rata tahunan sebesar 0.9 - 1.1°C di wilayah NTB, Kenaikan suhu udara minimum rata-rata tahun 2001 - 2010 sebesar 0.7°C, tertinggi 1.4°C di tahun 2010. Proyeksi peningkatan nilai suhu minimum tahunan di tahun 2020-2049 sebesar 2.3 - 2.7°C di wilayah NTB.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Efek perubahan iklim global yang berdampak terhadap sumber daya air di wilayah NTB : Pola curah hujan mengalami perubahan dan tidak dapat diprediksi secara tepat waktunya, Peningkatan intensitas kejadian bencana banjir, kekeringan, badai dan tanah longsor, Pengurangan jumlah mata air di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 750 buah pada Tahun 1980 menjadi sekitar 300 buah pada Tahun 2006, Meningkatnya percepatan sedimentasi pada sarana dan prasarana sumber daya air seperti embung, waduk dan saluran irigasi.

03

Kebijakan dan Strategi

Pengintegrasian RAD-API dengan RPJMD, RKP Provinsi dan Kabupaten/Kota: Koordinasi oleh BAPPEDA dalam forum secara menyeluruh dan terpadu yang dihadiri unsur pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAD API : membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja dengan Keputusan Gubernur, yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, membentuk sekretariat RAD-API yang berkedudukan di Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

04

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Telah di susun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 36 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Provinsi Nusa Tenggara Barat. RAD-API menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta

pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim.



Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Target Pencapaian Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenganggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 14.5 : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.								
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP (data RZWP3K)	Ha	225.965,32	769.425	126.311	Dinas kelautan dan Perikanan	
Target 14.6 : Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.								
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	98	99,91	99,91	Dinas kelautan dan Perikanan	
Target 14.b : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.								
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Orang	17794	26558	Tidak ada data (anggaran di refocusing)	Dinas kelautan dan Perikanan	

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Ekosistem lautan terdiri dari ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun dan ekosistem mangrove yang menjadi satu kesatuan dalam system ekologi perairan laut. Mengingat fungsi dan perannya sangat strategis maka beberapa kawasan di perairan laut NTB telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah provinsi NTB dengan luasan pada tahun 2018 mencapai 241.051,13 ha dan mengalami tren penambahan luasan di Tahun 2019 menjadi 263.189,60 ha. Luasan tersebut masih jauh dari total luasan perairan laut NTB seluas 2.915.903,960 ha. Pada tahun 2021 jumlah luas Kawasan konservasi

perairan NTB mencapai 126.311 ha. sehingga penetapan sebagian luasan perairan tersebut tidak menghambat aktivitas kegiatan usaha disebagian besar perairan laut NTB. Hal ini terlihat dari kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan mengalami tren peningkatan yang signifikan seperti di tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu dari target 99,91% dan terealisasi mencapai 99,91%. Sedangkan terkait dengan indikator jumlah nelayan terlindungi atau terfasilitasi dengan asuransi pada tahun 2021 tidak ada data karena anggaran untuk asuransi nelayan mengalami refocusing akibat covid-19.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Pengelolaan ekosistem lautan sangat ditentukan sejauh mana komitmen semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya alam di laut secara optimal, terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan terpadu dan berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan pola pemanfaatan lestari yang senantiasa memperhatikan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam bagi generasi mendatang. Pola pelestarian atau dikenal dengan istilah konservasi pada sebagian perairan laut tentu akan menimbulkan pro dan kontra antar pihak yang berkepentingan. Misalnya bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha merasa dibatasi menggunakan ruang laut. Namun sebaliknya pemerintah berhak melakukan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perairan laut guna memastikan tidak terjadi over eksploitasi yang melebihi daya dukung dan daya tampungnya. Sehingga pada suatu saat perairan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan dapat menjadi kawasan **Bank Ikan** yang pada akhirnya berimplikasi pada terwujudnya kesejahteraan nelayan dan menjaga keberlangsungan iklim investasi di Nusa Tenggara Barat.

03

Kebijakan dan Strategi

Guna mewujudkan ekosistem lautan yang lestari di Provinsi NTB salah satunya adalah memperkuat kebijakan pemerintah daerah melalui penguatan regulasi yang mengatur tata kelola pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan lautan. Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi NTB sudah memiliki peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi NTB Tahun 2017 – 2037 serta Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 sebagai salah satu instrument untuk mengatur pengendalian pemanfaatan sumberdaya laut di NTB. Namun guna memastikan aspek ketaatan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya lautan perlu didorong terbitnya peraturan gubernur terkait dengan tata cara pembinaan dan pengawasan yang merupakan salah satu amanat Perda 12 Tahun 2017 tersebut. Adapun strategi yang diharapkan adalah mendorong partisipasi semua pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung untuk secara arif dan bijaksana dalam pemanfaatan potensi sumberdaya lautan agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

04

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs



Guna mendorong terwujudnya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan 14 ekosistem lautan adalah memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, mendorong terbitnya Pergub tentang kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta memfasilitasi perluasan pelayanan asuransi nelayan dan juga mendorong peningkatan investasi usaha sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan.



Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Target Pencapaian Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 15.1 : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LHK	%	4,87 (2018)	5,31		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Target 15.2 : Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global..								
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Dinas LHK	Ha	-	-		BKSDA NTB	
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas LHK	Ha	PM	PM	PM	Dinas LHK	
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas LHK	KPH	11	15	15	Dinas LHK	
Target 15.3 : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.pasar.								
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LHK	%	0,142 (2018)	0,156	0,618	Dinas LHK	

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60, dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. Jika dibandingkan dengan data IKTL Nasional, data kualitas tutupan lahan NTB lebih baik. Indek tutupan lahan tahun 2018 adalah 61,27* (*nilai proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018*), sedangkan Nilai IKTL NTB tahun 2019 belum tersedia karena masih tahun berjalan dan dalam proses pengukuran sehingga IKTL NTB tahun 2019 akan diketahui di tahun berikutnya (2020).

02

Tantangan dan Pembelajaran

Masih dijumpai terjadinya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Untuk menekan tindak pidana kehutanan tersebut Dinas LHK melakukan operasi pengamanan hutan juga dilaksanakan di areal hutan seluas 129.250 hektar.

03

Kebijakan dan Strategi

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan.

04

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya lain yang dilakukan adalah melalui kegiatan rehabilitasi daerah tangkapan, dengan membuat bangunan sipil teknis yang berfungsi untuk mempertahankan tanah dan air di sekitar daerah tangkapan melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal. Tahun 2019, direncanakan akan dibangun 80 bangunan sipil teknis di beberapa wilayah KPH NTB.



Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh







Target Pencapaian Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
TARGET 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kepolisian	Kasus	20	12	12	Kepolisian	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000	Kepolisian	orang	14	PM	0	Kepolisian	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	penduduk.							
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS :	%	15 (2016)	0,96	1,49	Kepolisian	▲
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya.	kepolisian	orang	5.466.688	6.228.981	1081	Kepolisian	▲
TARGET 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS : Susenas (Modul Ketahanan Sosial)	%	PM	PM	PM	Kepolisian	
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Sosial Prov. NTB	Anak	707	280	76	Kepolisian, Dinas Sosial	●
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kepolisi an	Anak	391	270	431 (P=162, L=269)	Kepolisian	▲
TARGET 16.3 : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								
16.3.1.(a)	Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Kepolisi an	orang	19	13	44	Kepolisian	▲
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin	Kement erian Hukum	orang	PM	PM	PM	Biro Hukum Setda Provinsi NTB,	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
	yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	dan Hak Asasi Manusia					Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan NTB	
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	MA	Perkara	PM	PM	PM	Pengadilan Tinggi Provinsi NTB	
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	%	PM	PM	PM	Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan NTB	
TARGET 16.5 : secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	indeks	PM	PM	PM	KPK NTB	
TARGET 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	BPKAD	%	PM	PM	PM	BPKAD	
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPK	%	PM	PM	PM	BPK	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem	BKD	%	PM	PM	PM	BKD	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).							
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	BPKAD, LPSE	%	PM	PM	PM	BPKAD, LPSE	
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BKD	%	PM	PM	PM	BKD	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Ombudsman RI	%	PM	PM	PM	Ombudsman RI	
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	KPU	%	10 (2014)	PM	0	KPU	
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi NTB).	KPU	%	9,23 (2014)	PM	0	KPU	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	13,04	15,5	13,64	BKD	
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS : IDI	%	93,98	76	87,21	Bakesbangpolda gri	
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS : IDI	%	79,40	89,4	78,38	Bakesbangpolda gri	
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS : IDI	%	62,08	63,83	62,88	Bakesbangpolda gri	
TARGET 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS : Susenas	%	58,39	68	72,36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
16.9.1.(b)	Persentase anak usia 0- 17 Tahun menurut kepemilikan akta kelahiran dan kabupaten/kota diProvinsi NTB	BPS : Susenas	%	74,66	82,12	88,7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
TARGET 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komisi Nasional HAM	Berkas Pengaduan	PM	PM	PM	Komisi Nasional HAM Perwakilan NTB	
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia	Komnas Perempuan	%	PM	PM	PM	Komisi Nasional Perempuan Perwakilan NTB	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
	(HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.							
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
TARGET 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komnas Perempuan	Kebijakan/Dokumen	PM	PM	PM	Komisi Nasional Perempuan Perwakilan NTB	

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Penurunan jumlah konflik sosial adalah indikator yang dapat mencerminkan situasi dan kondisi keamanan di daerah. Keberhasilan dalam mengatasi terjadinya konflik sosial tidak hanya dari kuantitasnya, akan tetapi dari segi kualitasnya juga dapat diturunkan. Pada tahun 2021 penurunan jumlah konflik sosial dari target yaitu 16,67 persen teralisasi 25 persen. Terjadi penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu 57,14 persen

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi NTB, indeks reformasi birokrasi Provinsi NTB Tahun 2021 adalah kategori BB, sesuai target yang ditetapkan yaitu BB. Capaian ini juga meningkat dari tahun 2020 dengan kategori B.

Tercapainya target ini merupakan sasaran dalam mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi diantaranya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan fiskal daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Masih minimnya sarana dan prasarana keamanan di tingkat desa/kelurahan. Disamping itu juga belum dibuatnya peraturan tertulis berupa Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga ada pengendalian dalam menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak merugikan masyarakat lainnya.

03

Kebijakan dan Strategi

Melakukan mediasi antar warga kampung yang berkonflik maupun yang berpotensi terjadinya konflik terutama di daerah-daerah yang dipetakan rawan konflik. Selanjutnya BPSDM dalam RPJMD Tahun 2019-2023 menetapkan program pendukung utama untuk pencapaian Sasaran

Penataan Sistem Manajemen SDM dengan indikator Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN.

04

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs


Upaya yang dilakukan untuk meredam dan meminimalisir potensi konflik adalah: Mengoptimalkan peran Mitra Kerja Bakesbangpoldagri seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jejaring, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) untuk mendeteksi dan cegah dini setiap potensi konflik yang ada di lapangan, Melakukan koordinasi yang intensif dengan semua Kesbangpol seluruh Kabupaten/Kota se-NTB guna mencegah lebih dini potensi konflik maupun untuk mempercepat penyelesaian konflik yang terjadi.




Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Target Pencapaian Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penganggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
TARGET 17.1 : Memperkuat mobilitas sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS	%	1,21	1,26	Tidak tersedia data	BAPPENDA	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB.	Bappenda	%	0,95 (2018)	0,97	1,12	BAPPENDA	●
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. 12 bulan terakhir.	Bappenda	%	24,40	29,91	26,75	BAPPENDA	▲

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
TARGET 17.3 : Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.								
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2T KI, BI	US\$	12.556,94	7.589,6 2	51.026,1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BI	
TARGET 17.6 : Meningkatkan kerjasama Utara-selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	BPS	%	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan	
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	BPS, Dinas Perhubungan	%	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan	
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Perhubungan	%	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan	
TARGET 17.8 : Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS : Susenas	%	22,64	39	52,96	Dinas Komunikasi dan Informatika	
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi dan Informatika	
TARGET 17.9: Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, selatan-selatan dan Triangular.								
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi	Bapped	Rupiah	PM	PM	PM	Bappeda	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
	pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia	a						
TARGET 17.11 : Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	-96,33 (2016)	11	1,3	Dinas perdagangan	▲
TARGET 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.								
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPPTSP	Dokumen	PM	PM	PM	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPPTSP	
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan,	Dokumen	PM	PM	PM	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPPTSP	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
		Dinas ESDM, DPMPT SP						
<p>TARGET 17.18: pada tahun 2020 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan tepat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>								
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BPS	%	34	40	-	BPS, OPD sumber data	
17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).	BPS	Strategi Daerah	PM	PM	PM	Bappeda	
<p>TARGET 17.19: Pada Tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</p>								
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	BPS	Sensus Penduduk	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	BPS	Data registrasi	PM	PM	148,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, BKKBN	
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	507,744	95,413	98,48	Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS, Biro Umum	
17.19.2.(d)	Persentase	BPS	%	98	99	-	BPS	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2021		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).							
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik(BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS	%	6,03 (2016)	24,5	-	BPS	

01

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Pada tahun 2020 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB sebesar 0,51 atau masuk dalam kategori “Sedang”. Sedangkan pada tahun 2021, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB masih tetap 0,51 hal ini menunjukkan tidak ada perubahan pada capaian fiskal daerah. Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 35,45 pada tahun 2021 terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 0,36. Lebih dirinci, Pertumbuhan pajak daerah tahun 2021 Adalah sebesar 3,16% atau terealisasi Rp. 5.305.792.201.939,-. Retribusi Daerah tahun 2021 mengalami Penurunan realisasi hingga -44.38% akibat dampak pandemic covid-19, komponen Lain-lain PAD yang sah tahun 2021 juga mengalami penurunan hingga 2,44%.

02

Tantangan dan Pembelajaran

Pada tahun 2020-2021 ini penerimaan PAD mengalami penurunan akibat pandemic covid-19, dimana sebagian besar asset dan potensi penerimaan PAD mengalami penurunan yang mengakibatkan penerimaan PAD tidak dapat optimal seperti yang direncanakan. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 menurun sampai

dengan 21,31% dari periode yang sama tahun 2020 akibat menurunnya deviden hampir semua BUMD.

03

Kebijakan dan Strategi

Program pendukung untuk mencapai indikator ini yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Melakukan dengan peningkatan kualitas layanan yang inovatif dan modern, yaitu e-Pendapatan (sudah termasuk e- Samsat dan Samsat Delivery) yang dihajatkan untuk mendekatkan pelayanan Bappenda kepada masyarakat wajib pajak, sekaligus untuk menunjang optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah. diantara layanan pembayaran pajak daerah (e-Samsat), layanan jemput antar pembayaran PKB (Samsat Delivery), serta layanan penyetoran retribusi daerah (e-STS Retribusi). Untuk itulah Bappenda Provinsi NTB mengintegrasikannya ke dalam aplikasi e-Pendapatan merupakan program digitalisasi pendapatan daerah yang mengadopsi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) guna menghasilkan pengelolaan pendapatan yang akurat, kuat, responsif, efektif dan efisien

04

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan yang dilakukan adalah; Menambah jam layanan yakni Samsat Night Music setiap sabtu malam yang beroperasi didepan kantor Bappenda Provinsi NTB (jalan Majapahit) dengan menghadirkan music dan penyanyi yang menghibur masyarakat/Wajib Pajak serta pemberian Door Price, Memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan OPD yang potensial dalam berkontribusi terhadap peningkatan PAD, Melakukan koordinasi dengan BPKAD, Bank NTB dan Instansi terkait lainnya untuk memantapkan e-sts Online Retribusi.

BAB III

PEMBELAJARAN TPB/SDGS

Pembelajaran TPB/SDGs

No	Uraian	Keterangan
1	Tujuan dalam SDGs	Tujuan 2. Mengakhiri Kelaparan
2	Nama Instansi	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
3	Nama Program	Desa Berdaya Rumah Gizi Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
4	Lokasi Kegiatan	

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten
1	Paruga	Rasanae Barat	Kota Bima
2	Santi	Mpunda	Kota Bima
3	Nata	Palibelo	Kab. Bima
4	Ngali	Belo	Kab. Bima
5	Dena	Madapangga	Kab. Bima
6	Kole	Ambalawi	Kab. Bima
7	Ntonggu	Palibelo	Kab. Bima
8	Mbawa	Donggo	Kab. Bima
9	Malaju	Kilo	Kab. Dompu
10	Lepadi	Pajo	Kab. Dompu
11	Simpasai	Woja	Kab. Dompu
12	Sukadamai	Manggalewa	Kab. Dompu
15	Bugis	Sumbawa	Kab. Sumbawa
14	Jorok	Unter Iwes	Kab. Sumbawa
15	Pamanto	Empang	Kab. Sumbawa
16	Kerato	Unter Iwes	Kab. Sumbawa
17	Kerekeh	Unter Iwes	Kab. Sumbawa
18	Dalam	Alas	Kab. Sumbawa
19	Lenangguar	Lenangguar	Kab. Sumbawa
20	Gontar	Alas Barat	Kab. Sumbawa
21	Brang Biji	Sumbawa	Kab. Sumbawa

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten
22	Boak	Unter Iwes	Kab. Sumbawa
23	Uma Beringin	Unter Iwes	Kab. Sumbawa
24	Moteng	Brang Rea	Kab. Sumbawa arat
25	Seloto	Taliwang	Kab. Sumbawa arat
26	Tepas	Brang Rea	Kab. Sumbawa arat
27	TelagaWaru	Pñggabaya	Kab. Lombok Timur
28	Lenek	Lenek	Kab. Lombok Timur
29	Lepak Timur	Sakra Timur	Kab. Lombok Timur
30	Sakra Selatan	Sakra	Kab. Lombok Timur
31	Gelanggang	Sakra Timur	Kab. Lombok Timur
32	Tete Batu	Sikur	Kab. Lombok Timur
33	Nyiur Tebel	Sukamulia	Kab. Lombok Timur
34	Sepakek	Pringgarata	Kab. Lombok engah
35	Darmaji	Kopang	Kab. Lombok engah
36	Batu Tulis	Jonggat	Kab. Lombok Tengah
37	Gonjak	Praya	Kab. Lombok engah
38	Montong Gamang	Kopang	Kab. Lombok engah
39	Tampak Siring	Batukliang	Kab. Lombok engah
40	Jembatan Gantung	Lembar	Kab. Lombok Barat
41	Bajur	Labuapi	Kab. Lombok Barat
42	Selat	Narmada	Kab. Lombok Barat
43	Beleke	Gerung	Kab. Lombok Barat
44	Kediri Selatan	Kediri	Kab. Lombok Barat
45	Senaru	Bayan	Kab. Lombok Utara
46	Anyar	Bayan	Kab. Lombok Utara
47	Sukadana	Bayan	Kab. Lombok Utara
48	Sesait	Kayangan	Kab. Lombok Utara
49	Dasan Agung Baru	Selaparang	Kota Mataram
50	Pagutan Timur	Mataram	Kota Mataram

Waktu Kegiatan: tahun 2021

Proses pelaksanaan:

- Rumah Gizi Pekarang Pangan Lestari (P2L) di Nusa Tenggara Barat, adalah kolaborasi antara Pemprov NTB (Dinas Ketahanan Pangan)

dengan Program Desa Berdaya Rumah Zakat.

- Program Rumah Gizi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dilaksanakan di 50 Desa Berdaya Berdaya yang tersebar di 2 Kota dan 8 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Aktivitas yang dilaksanakan dalam program ini diantaranya :
 1. Pembentukan kader Rumah Gizi atau kelompok tani
 2. Pelatihan serta edukasi tentang gizi dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) kepada kader maupun masyarakat umum dilokasi implementasi
 3. Pembangunan Rumah Bibit
 4. Proses penyemaian bibit tanaman meliputi sayuran, buah — buahan, tanaman obat keluarga, dan tanaman lokal pengganti beras.
 5. Pembagian bibit kepada masyarakat
 6. Pemantauan P2L (Pekarangan Pangan Lestari)
- Pelaksanaan program di lapangan dilaksanakan oleh Relawan lokal dari Rumah Zakat yang disebut Relawan Inspirasi yang bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti aparat Desa setempat serta Dinas Ketahanan Pangan tingkat Kota maupun Kabupaten

Hasil dan Dampak:

Hasil Program Desa Berdaya Rumah Gizi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagai berikut :

1. Rumah bibit yang terbangun sebanyak 76 rumah bibit
2. Telah terbentuk 501 titik kebun Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
3. Total jumlah tanaman yang telah ditanam sebanyak 6.618 tanaman dengan 54 jenis tanaman.
4. Capaian jumlah penerima manfaat sebanyak 577
 - Sementara itu Pengukuran dampak Program Desa Berdaya Rumah Gizi

Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dilakukan melalui penelitian kaji dampak dengan Judul Analisis Pengetahuan, Sikap, Preferensi dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Penerima manfaat Terhadap Buah dan Sayur di Kebun Gizi.

- Program Desa Berdaya Rumah Gizi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap dan preferensi para penerima manfaat terhadap buah dan sayur

Tantangan dan Pembelajaran:

Tantangan

1. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dikarenakan sebagian wilayah implementasi berada didaerah masyarakat pertanian.
2. Faktor alam dan hama yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada kebun P2L yang dimiliki oleh para penerima manfaat

Pembelajaran

1. Pelaksanaan program Kebun Gizi dapat dioptimalkan untuk wilayah urban sehingga dampaknya akan lebih dirasakan oleh masyarakat
2. Peningkatan jenis sayur dan buah yang dapat ditanam di pekarangan rumah (P2L) dan Rumah Gizi, sehingga dapat meningkatkan *food frequency* penerima manfaat dan mengurangi pengeluaran konsumsi sayur dan buah

Peluang dan Reflikasi

- Melihat besarnya dampak perubahan dari Program Rumah Gizi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tahun 2021, maka program ini dapat Kembali dilanjutkan tahun berikutnya di wilayah Desa Berdaya yang berbeda. Praktik baik yang telah terlaksana pada implementasi program tahun 2021 akan dipertahankan dan menjadi pembelajaran untuk optimalisasi program pada tahun 2022.
- Sinergi antara Relawan Inspirasi Rumah Zakat dengan stakeholder terkait menjadi peluang program ini dapat lebih berkembang pada tahun 2022

DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Relawan Inspirasi melakukan pemantauan inovasi tanaman Budisurbox (Budidaya Sayur dalam Box) di Desa Melaju dan Desa Beleke



Inovasi media tanam pengganti polibag dari sabut kelapa di Desa Pagutan Timur dan Telaga Waru



Kegiatan pelatihan dan edukasi tentang gizi dan tanaman kepada masyarakat

DOKUMENTASI KEGIATAN



Kebun Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Laporan tahunan SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah terkait organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk percepatan pencapaian target –target indikator sesuai Rencana Aksi Daerah 2019-2023. Hal ini penting dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kunci keberhasilan percepatan pencapaian target-target indikator SDGs di Provinsi NTB adalah dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan/pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan kerjasama intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sinergitas program/kegiatan yang mendukung capaian indikator agar tepat sasaran serta komitmen pimpinan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dokumen Laporan tahunan SDGs Provinsi NTB Tahun 2021 ini merupakan upaya sistematis dalam jangka pendek dan jangka menengah untuk percepatan pencapaian target indikator SDGs sesuai dengan perkembangan lingkungan, potensi wilayah, karakteristik, dan sosial budaya masyarakat. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk tindak lanjut serta dapat dijadikan untuk pembelajaran kedepan termasuk diharapkan sebagai acuan juga untuk lahirnya inovasi-inovasi dalam mempercepat capaian target SDGs pada tahun 2023.

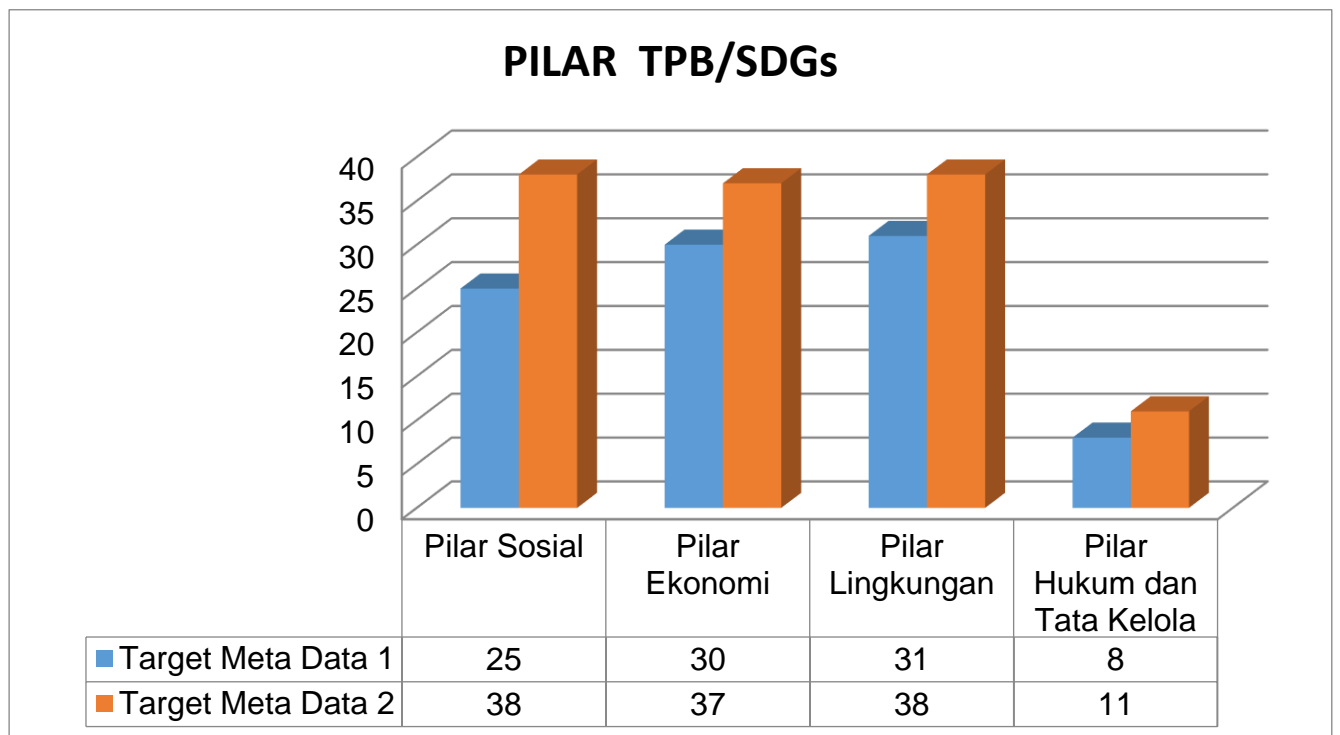
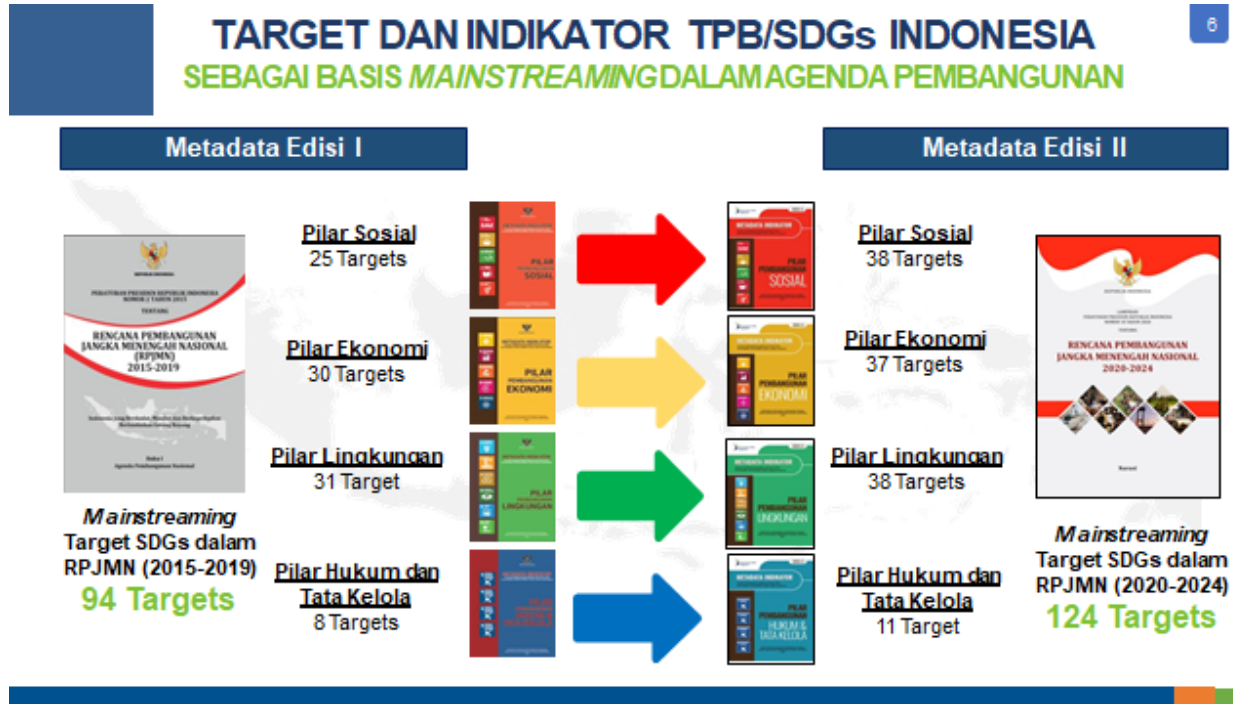
DAFTAR PUSTAKA

1. Rilis Badan Pusat Statistik tanggal 1 Maret 2022
2. Rilis Badan Pusat Statistik tanggal 7 Februari 2022
3. Rilis Badan Pusat Statistik tanggal 2 Februari 2022
4. Laporan akhir dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2021
5. Laporan akhir dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB tahun 2021
6. Laporan akhir dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tahun 2021
7. Laporan akhir dinas Perdagangan Provinsi NTB tahun 2021
8. Laporan akhir Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2021
9. Laporan akhir dinas Perhubungan Provinsi NTB tahun 2021
10. Laporan akhir dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2021
11. Laporan akhir dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2021
12. Laporan akhir dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi NTB tahun 2021
13. Laporan akhir dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB tahun 2021
14. Laporan akhir dinas Sosial Provinsi NTB tahun 2021
15. Laporan akhir dinas Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB tahun 2021
16. Laporan akhir dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB tahun 2021
17. Laporan akhir dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2021
18. Laporan akhir Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun 2021
19. Laporan akhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB tahun 2021

20. Laporan akhir Inspektorat Provinsi NTB tahun 2021
21. Laporan akhir Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB tahun 2021
22. Laporan akhir dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi NTB tahun 2021
23. Laporan akhir dinas Perpustakaan Daerah Provinsi NTB tahun 2021
24. Laporan akhir dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tahun 2021
25. Laporan akhir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB tahun 2021
26. Laporan akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB tahun 2021
27. Laporan akhir Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2021
28. Laporan akhir Sekretariat Daerah Provinsi NTB tahun 2021
29. Laporan Bank Indonesia Provinsi NTB tahun 2021.

Lampiran :
Indikator Pilar Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals
(TPB / SDGs)

PILAR TPB/SDGs



Lampiran 2

Capaian Indikator TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

No	Tujuan	Jumlah Indikator	Status Capaian			
			Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak ada target/data
1	Tanpa Kelaparan	22	4	1	6	11
2	Tanpa Kelaparan	12	10	-	2	-
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	38	16	4	5	13
4	Pendidikan Berkualitas	18	7	6	5	-
5	Kesetaraan Gender	18	5	1	4	8
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	24	15	-	2	7
7	Energi Bersih dan Terjangkau	3	2	-	-	1
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	15	5	-	6	4
9	Industri Inovasi dan Infrastruktur	12	3	-	2	7
10	Berkurangnya Kesenjangan	11	4	-	2	5
11	Kota dan Permukiman Berkenajutan	20	2	-	3	15
12	Konsumsi dan Produksi Berkenajutan	8	1	-	2	5

No	Tujuan	Jumlah Indikator	Status Capaian			
			Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak ada target/data
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	1	-	1	
14	Ekosistem Lautan	3	1	-	2	-
15	Ekosistem Daratan	5	2	-	-	3
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	31	5	1	6	19
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	20	3	-	2	15
	Jumlah	262	86	13	50	113

CAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGs PROVINSI NTB TAHUN 2021

